BAB II

ANALISIS PENDEKATAN TIONGKOK KE FILIPINA SEBAGAI *LINKER*

Tiongkok memiliki catatan sejarah sendiri mengenai klaim daerah ini yaitu dengan menggunakan peta yang merinci kepada klaim kedaulatan Tiongkok akan Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok menyatakan bahwa klaim mereka merujuk kepada 2000 tahun lalu, sebagai acuan Tiongkok mengklaim dan menetapkan hukum Nine-Dash Line ketika kawasan Paracel dan Spratly telah menjadi bagian dari kawasan Tiongkok. Namun pernyataan itu tidak dibenarkan oleh pihak ASEAN karena sejak abad ke-17, ASEAN telah memiliki dokumen sebagai bukti kepemilikan wilayah Paracel dan Spratly sampai dasawarsa 1940-an (Dzurek, 1996, p. 8).

Begitu pula dengan Filipina yang juga memiliki klaim yang sama atas sebagian wilayah itu. Bukan hanya Filipina dan Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam juga mempunyai klaim atas wilayah Laut Tiongkok Selatan yang masih dalam kawasan *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) mereka yang telah ditetapkan oleh PBB terkait hukum laut pada tahun 1982. Oleh karena itu, Tiongkok menempati posisi penting dalam permasalahan Laut Tiongkok Selatan. (Bautista, 2007, p. 700).

Pembahasan *Issue Linkage* mengenai hal yang paling penting untuk diketahui adalah siapa saja aktor dan perannya masing-masing yang terlibat dalam permasalahan. Aktor dan peranya ini dibagi oleh Haas di *Issue Linkage* menjadi dua bagian yakni dikenal dengan *Linker* dan *Linkee* (Haas, 2011, p. 372). Bab 2 ini akan membahas lebih detailnya posisi Tiongkok dengan membagi menjadi empat subbab yakni Tiongkok sebagai *Linker*, tujuan yang ingin dicapai oleh Tiongkok, Tawaran

Linker oleh Tiongkok dan aspek *Win* dan *Loss* yang akan diterjemahkan dengan aspek keuntungan dan kerugian dari Tiongkok.

2.1 TIONGKOK SEBAGAI *LINKER*

Tiongkok sebagai negara yang memberikan tawaran isu BRI kepada Filipina yang sekaligus sebagai pihak *linker* dalam kasus *Issue Linkage.* Penawaran tersebut sebagai tindakan hubungan timbal balik antara keduanya atau interdependensi, yang mana hal ini ada pada pelaksanaan proyek BRI Tiongkok ke Filipina (Chelsea Huth, 2017, p. 225). Pendekatan *Issue Linkage*, Haas memaparkan bahwa kebanyakan pihak *Linker* memiliki power lebih besar dibandingkan *Linkee*, terlebih lagi ketika hasil kesepakatan dalam sebuah perjanjian yakni sangat besar dikendalikan oleh pihak *Linker* dalam mempengaruhi persepsi *Linkee* (Haas, 2011, p. 372).

Tiongkok adalah negara yang mempunyai power lebih kuat di bidang keamanan dan ekonomi dibandingkan dengan Filipina. Dalam pelaksanaannya Tiongkok sangat terlihat sebagai pihak yang memberikan akses secara penuh terkait isu yang dihadapkan kepada Filipina. Tawaran ini dibuat Tiongkok untuk meyakinkan Filipina bahwa Tiongkok adalah sebuah Solusi pembangunan perekonomian negaranya dengan cara pengajuan tawaran kerja sama BRI ini (Wong P. , 2017). Di sisi lain Tiongkok seolah mengarahkan persepsi Filipina terhadap kerja sama yang saling menguntungkan bukan hanya keuntungan sepihak.

Pihak *Linker* akan lebih aman jika mampu meyakinkan *Linkee* terhadap tawaran yang disampaikan sebagai interdependensi yang menguntungkan. Walaupun tidak adanya pengetahuan maupun bukti yang nyata dan adanya indikasi tawaran akan

ditolak oleh pihak *Linkee*. Namun pihak negosiator atau *Linker* harus memberikan gambaran akan dampak yang jelas dalam pelaksanaan kerja sama antara kedua negara. Hal ini perlu diperdalam oleh *Linker* dikarenakan masing-masing pihak menggunakan psikologi pertahanan yang berbeda, serta tujuan dari kepentingan yang berbeda (Haas, 2011, p. 373). Tiongkok sebagai negara yang lebih maju dari Filipina mampu menjalankan penawaran proyek BRI dengan baik. Sehingga tujuan kepentingan Tiongkok sebagai *Linker* akan tercapai dengan berhasil menguasai perspektif *Linkee* untuk menjalin kerja sama.

2.2 TUJUAN YANG INGIN DICAPAI TIONGKOK

Sebagaimana yang telah dibahas di atas, awal mula permasalahan dengan Tiongkok melihat celah aturan yang tertera dari kesepakatan isi dari DOC. Isi tersebut ialah bahwa kedua belah pihak harus menahan diri dalam melakukan kegiatan yang akan memperumit atau meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas (Thayer C. , 2015, p. 3). Termasuk antara lain, menahan diri dari tindakan apapun seperti menghuni pulau-pulau yang saat ini tidak berpenghuni, terumbu karang, beting, gundukan tanah, dan ciri-ciri lain, dan untuk menangani perbedaan mereka secara konstruktif. Namun, isi deklarasi tidak menjelaskan secara detail kegiatan apa yang dapat dianggap mempersulit atau memperuncing perselisihan (Fravel, 2011, p. 299).

Sebagai negara lebih kuat, pendekatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan menentukan sifat perselisihan. Sejak 2007-2008, karena Beijing mengoreksi kebijakannya terhadap masalah Laut Tiongkok Selatan dengan pendekatan yang lebih

tegas, situasinya menjadi tegang lagi. Pada bulan Desember 2007, Tiongkok mendirikan kota Sansha untuk administrasi Paracel dan Spratly Islands (dan terumbu karang Macclesfield Bank), yang memicu protes resmi yang kuat dari Filipina serta demonstrasi anti Tiongkok. Pada bulan Januari 2010, Tiongkok memutuskan untuk membentuk badan-badan pemerintahan lokal di Kepulauan Paracel dan mengembangkan industri pariwisata pulau itu dan tindakan itu memancing kecaman sebagai pelanggaran kedaulatan negara Filipina (Truong, 2011).

Kemudian, Tiongkok meloloskan Rencana Besar 2010-2020 untuk Konstruksi dan Pengembangan untuk Pulau Pariwisata Internasional Hainan. Kepulauan Spratly dan Paracel akan dimasukkan ke dalam kompleks laut multi tujuan, rute wisata udara dan laut yang menuju Paracel akan dipromosikan, dan pendaftaran hak untuk menggunakan pulau tak berpenghuni (China Ministry, 2010). Secara garis besar tujuan Tiongkok memiliki dua aspek yang harus dicapai dalam menjalankan perannya sebagai *Linker* kepada Filipina. Dua aspek itu yakni Tiongkok ingin mencapai kepentingan Keamanan dan kepentingan perekonomian yang berdampak kepada kedaulatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

2.2.1 Tujuan Keamanan Tiongkok

Tiongkok mengawali klaim atas Laut Tiongkok Selatan sebagai daerah wilayah teritorialnya. Pastinya klaim Tiongkok memicu beberapa klaim balasan atas beberapa negara ASEAN lainnya termasuk Filipina. Namun, penulis menganalisis hal yang perlu diketahui adalah upaya Tiongkok dalam melakukan ketidakkonsistenan dalam peraturan *Declaration on the Conduct* (DOC). Serta beberapa pembangunan masif seperti pembangunan pulau serta melakukan kegiatan militer di luar wilayah

teritorialnya pasti memiliki alasan serta tujuan dalam pencapaian keamanan di wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Tiongkok menginginkan keamanan tidak lain adalah untuk pendekatan maritimnya. Negara ini bergantung pada kemakmuran ekonominya pada arus perdagangan energi dan komoditas barang masuk dan barang jadi ke pasar. Namun menurut Nick Bisley bahwa pada abad kesembilan belas Tiongkok direndahkan oleh kekuatan asing yang merobek negara itu dan mempermalukan rakyatnya, setidaknya begitulah mitologi nasionalis Tiongkok. Klaim Partai terhadap legitimasi tergantung pada kemampuannya untuk melindungi kewibawaan negaranya (Bisley, 2016).

Tiongkok harus mengamankan sarana yang digunakan pihak lain untuk mendekati Tiongkok sekalipun itu dalam kondisi perdagangan. Laut Tiongkok Selatan adalah sebagai gerbang depan Tiongkok serta tidak diinginkan gerbang tersebut menjadi rentan tanpa adanya kendali Tiongkok. Pembahasan terkait keamanan, penulis menganalisis adanya intervensi dari pihak luar yakni Amerika Serikat. Tiongkok menyadari bahwa rival besarnya yakni Amerika Serikat juga ikut andil dalam kontrol Laut Tiongkok Selatan (Morton, 2006, p. 937).

Isu dari campur tangan Amerika Serikat ini meliputi masalah-masalah dan tindakan diplomatik, militer, polisi, dan hukum negara-negara yang terlibat. Permasalahan yang Tiongkok dapatkan dengan AS yakni kompleks dan kontradiktif, yang berarti bahwa setiap keterlibatan AS perlu diberi informasi dan nuansa yang baik oleh Tiongkok (Bouchat, 2014, p. 15). Lara Seligman berpendapat bahwa perluasan operasi militer Amerika Serikat di Laut Tiongkok Selatan telah meningkatkan konfrontasi dengan Tiongkok. kebijakan Trump dengan meningkatkan konfrontasinya ke Tiongkok ke tingkat yang lebih serius berupa hampir $ 700 miliar yang disediakan

untuk peningkatan operasi militer di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Hal ini tentu saja menjadi ancaman keamanan bagi Tiongkok untuk pergerakannya di Laut Tiongkok Selatan (Seligman, 2018).

Tiongkok harus sangat hati-hati dan berani dalam mempertahankan kawasan Laut Tiongkok Selatan karena ancaman yang besar. yang selalu waspada akan pergerakan Tiongkok yakni Amerika Serikat. Melihat sejarahnya sendiri ada dua pakta yakni Tiongkok dan Amerika Serikat yang keduanya telah menjadi rival sejak lama ini, dalam waktu yang singkat dapat menjadi mitra dalam kerja sama ekonomi. Akan tetapi di Laut Tiongkok Selatan, dua kubu ini tidak pernah menyatu dan bahkan yang terlihat adanya perlombaan senjata. Diketahui bahwa pengeluaran pembelanjaan pertahanan meroket yang mana lebih dari 500.000 personil militer di kawasan Asia-Pasifik adalah dari Amerika Serikat (Pham P. , 2017).

Jumlah militer Amerika Serikat yang berada di kawasan ASEAN sendiri sudah sangat banyak. Selain itu, Filipina adalah negara yang memiliki kedekatan yang khusus dengan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Tiongkok tidak bisa membiarkan hal tersebut berkelanjutan mengingat klaim Tiongkok akan kawasan menyinggung daerah Filipina. Selain itu, Tiongkok akan memperkuat keamanannya dengan dukungan dari Filipina (Murray Hibert, 2015, p. 2). Tiongkok membangun sebuah milisi yang berlayar di laut, penjagaan pantai yang ketat, angkatan laut pribumi terbesar di Asia, dan persenjataan yang cukup besar dari darat untuk mempengaruhi kekuatan di laut sebagai laut semi tertutup. Data di atas, membuktikan bahwa Tiongkok benar-benar serius untuk mendapatkan kawasan regional stabil oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (Kurlantzick, 2011).

2.2.2 Tujuan Ekonomi

Di bidang ekonomi, Tiongkok dengan aktif berusaha menggantikan prinsip-prinsip liberal Konsensus Washington dengan model pembangunannya sendiri. Penggabungan hiper-kapitalisme dengan kebijakan neomercantilist, "Model Tiongkok" menawarkan pembangunan bersubsidi ke negara-negara berkembang tanpa pamrih. Model ini dimajukan sebagai nilai netral, karena tidak mengharuskan pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi atau menjunjung hak asasi manusia (Friend, Thayer, & John, 2018).

Model ini dimajukan sebagai nilai netral, karena tidak mengharuskan pemerintah untuk mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi atau menjunjung hak asasi manusia. Beijing menerapkan model ini yang memiliki dua tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek, Tiongkok akan bekerja dalam rezim perdagangan internasional saat ini, mendukung norma-norma yang telah ditetapkan, dan terus melakukan manuver dalam sistem ini untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya, yang bergantung pada pemeliharaan pembangunan ekonomi dan perdagangan (Friend, Thayer, & John, 2018).

Sejak reformasi ekonomi era Deng Xiaoping, Tiongkok telah menerima banyak norma dan aturan tatanan dunia liberal. Serta Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia *World Trade Organization* (WTO). Keterlibatan Tiongkok dalam sistem multilateralisme ini adalah kombinasi dari pilihan dan kebutuhan, karena pembangunan ekonomi Tiongkok bergantung pada integrasi global, memperluas pengaruh politiknya, dan mengembangkan soft powernya (Niquet, 2008).

Dalam jangka panjang, Tiongkok menjadi lebih kuat sedangkan Amerika Serikat menurun pengaruhnya. Beijing akan mendorong reformasi yang mempromosikan

hiper-kapitalisme dan meminimalkan prinsip demokrasi liberal dalam lembaga-lembaga internasional yang dipimpin Barat. Ketika semakin banyak negara bergabung dengan lembaga-lembaga yang dipimpin Tiongkok, Beijing akan dapat menggunakan kekuatan ekonominya sebagai pengaruh untuk membujuk melalui kombinasi pemerintah Barat dan non-Barat untuk mendukung dan mengadopsi reformasi ini (Friend, Thayer, & John, 2018).

Meskipun pembukaan perdagangan internasional Tiongkok berjalan cepat, Beijing akan terus mengejar kebijakan neomercantilist. Dalam hal ini, keterlibatan Tiongkok dalam lembaga multilateral sepenuhnya menjadi strategis. Beijing berusaha untuk mematikan persepsi ancaman dan membangun jaringan hubungan ekonomi. Hal ini yang dapat digunakan sebagai pengaruh dan sarana untuk memajukan agenda kebijakan luar negerinya sendiri (Sohn, 2015, p. 188).

Tujuan ekonomi Tiongkok pada Laut Tiongkok Selatan sebenarnya merujuk kepada Tiongkok sebagai pengimpor energi netto. Laut Tiongkok Selatan dianggap kaya akan minyak dan gas. Tiongkok tidak hanya menginginkan manfaat ekonomi yang berasal dari hak kedaulatan atas cadangan hidrokarbon tetapi juga keamanan pasokan yang akan diperlukan oleh Tiongkok. Sama halnya, Laut Tiongkok Selatan terdapat perikanan yang melimpah dan sebagai negara yang mengonsumsi volume protein yang terus tumbuh. Oleh karena itu, menguasai Laut Tiongkok Selatan akan menjadikan potensi yang sangat berharga bagi Tiongkok (Bisley, 2017).

Pada kasus ini, Tiongkok akan terus merangkul multilateralisme dan menjadi lebih terlibat dalam institusi internasional seperti WTO. Namun, sementara mencapai tujuan-tujuan ini, Beijing secara bersamaan mengembangkan institusi ekonomi yang dipimpin Tiongkok seperti *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB) dan *Belt and*

Road Initiative (BRI). Sementara itu, elit politik Tiongkok berdebat mendukung dan memperdalam nilai-nilai dan prinsip-prinsip liberal. Pada akhirnya, Tiongkok melancarkan strategi BRI selain untuk meningkatkan kekuatan ekonomi global Tiongkok, juga meningkatkan hubungan Filipina yang akan terus mendukung Tiongkok (Shepard, 2017).

Tujuan Tiongkok lebih mendalami Laut Tiongkok Selatan pada Beting Scarborough yang diperebutkan, serta adanya pembangunan pulau Sansha oleh Tiongkok. Hal ini menjadi salah satu dari banyak pulau, terumbu, dan beting yang disengketakan di Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dan Filipina. Bank Dunia memperkirakan bahwa Laut Tiongkok Selatan memiliki cadangan minyak sedikitnya tujuh miliar barel dan sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam, yang menawarkan peluang ekonomi luar biasa bagi negara-negara pesisir (Kipgen, 2017).

2.3 TAWARAN *LINKER* MELALUI PENGAJUAN BRI *(BELT AND ROAD INITIATIVE)*

Dalam mempertahankan posisinya untuk meraih tujuan yang ingin dicapai, Tiongkok melakukan langkah-langkah strategis. Status terakhir dari konflik Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok dengan Filipina sampai tahun 2018 belum menuai hasil yang jelas terkait klaim masing-masing negara. Sampai saat ini Tiongkok telah mendominasi kegiatan di Laut Tiongkok Selatan. Akan tetapi meninjau klaim Filipina ke Tiongkok yang sangat masif dan banyak, sekaligus kekhawatiran Filipina akan menjadi Aliansi Amerika terkait konflik kawasan ini. Oleh karena itu, Tiongkok

menawarkan kepada Filipina terkait pembangunan ekonomi Filipina dengan Investasi Pembangunan Infrastruktur dalam pelaksanaan BRI.

Perdana menteri Tiongkok Xi Jinping mengumumkan sepasang inisiatif yakni pengembangan dan perdagangan baru untuk Tiongkok dan kawasan sekitarnya. Pada akhir 2013, Ekonomi Jalur Sutra dan Jalur Sutra Maritim bersama-sama dikenal sebagai BRI (Xinhua, 2016). Kebijakan BRI mewakili ekspansi kapitalisme negara Tiongkok yang ambisius, didorong oleh kelebihan kapasitas produksi industri, serta oleh munculnya minat pertumbuhan perekonomian BRI menunjukkan skenario regional secara umum yang mirip dengan di Eropa antara akhir abad kesembilan belas dan tahun-tahun sebelum Perang Dunia Pertama, ketika negara-negara yang kuat saling berdesakan untuk dominasi industri dan militer. Upaya BRI menggabungkan kekuatan lahan dan kekuatan maritim, memperkuat hegemoni laut Tiongkok yang ada di Asia Timur (Banerjee, 2016, p. 5).

Cita-cita dari konsep ini ialah membangun koridor ekonomi berbasis laut dan lahan yang sangat terintegrasi, kooperatif, dan saling menguntungkan yang menghubungkan pasar Eropa dan Asia. Jalur yang dilintasi proyek BRI adalah dari benua Asia, Afrika dan Eropa. Serta yang menghubungkan lingkaran ekonomi Asia Timur yang hidup di satu ujung dan mengembangkan lingkaran ekonomi Eropa di ujung yang lain dan termasuk negara-negara dengan potensi besar untuk pembangunan ekonomi (Tsui, 2017, p. 42).

Proyek ini lebih fokus pada menyatukan Tiongkok, Asia Tengah, Rusia dan Eropa yang menghubungkan Tiongkok dengan Teluk Persia dan Laut Tengah. Jalur ini melalui Asia Tengah dan Asia Barat; dan menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Samudera Hindia. Maritime Silk Road ini dirancang

untuk jalur dari pantai Tiongkok ke Eropa melalui Laut Tiongkok Selatan dan Samudera Hindia pada satu rute, dan dari pantai Tiongkok melalui Laut Tiongkok Selatan ke Pasifik Selatan (Swaine, 2013, p. 2).

Tiongkok memastikan bahwa daerah BRI mencakup jangkauan lebih dari 60 pasar negara berkembang, dengan jumlah penduduk lebih dari 4 miliar dan agregat ekonomi sekitar $ 21 triliun. penghitungan sekitar 65 persen dan 30 persen dari total global dalam nilai produksi ekonomi berbasis lahan dan maritim masing-masing. meninjau statistik dan luas geografis yang terlibat, BRI adalah sebagai Upaya inisiatif paling signifikan dan berjangkauan luas yang pernah dikemukakan Tiongkok (Jianmin, 2015).

Pada akhir Maret 2015, Beijing mengumumkan bahwa mereka telah membentuk kelompok khusus untuk mengawasi pelaksanaan BRI mengingat inisiasi ini sangat penting. Maksud dari pernyataan tersebut ialah bahwa kelompok elit akan bertanggung jawab atas mengkoordinasi dan membimbing pekerjaan yang terkait dengan inisiatif yang sayangnya tidak merinci dengan jelas anggota-anggotanya. Kelompok elite itu bertempat di bawah Komisi Reformasi dan Pembangunan Nasional, yakni perencana ekonomi terkemuka di Tiongkok (Albert, 2017).

BRI secara jelas dipandang oleh para pejabat dan pengamat Tiongkok sebagai proyek mayor bahkan dalam banyak hal penting usaha kebijakan luar negeri yang juga antusias dalam inisiatif ini. Hal ini tidak diragukan lagi bagi sebagian besar pejabat untuk antusias mendukung dan melancarkan penyelenggaraannya karena inisiatif ini diumumkan langsung oleh Xi Jinping. Hal yang ditekankan oleh Xi Jinping, bahwa sumber-sumber otoritatif Tiongkok menyajikan dengan cara yang paling

menguntungkan bagi seluruh anggota yang terlibat dan tidak adanya keputusan yang bersifat mengancam (Albert, 2017).

Inisiatif ini sebagai upaya bersejarah yang dirancang untuk membangun jaringan kegiatan ekonomi yang saling menguntungkan. Komunitas kepentingan yang lebih besar di antara tetangga Tiongkok dan di seluruh benua Eurasia dan rute maritim antara Tiongkok dan Eropa. Oleh karena itu, tujuan dari inisiatif ini adalah keuntungan bersama *win-win strategy* atau untung sama untung. Konsep ini jelas dipandang sebagai bagian utama dari keseluruhan tekad Tiongkok dalam gagasan revitalisasi nasional melalui kerja sama dalam dan luar negeri, serta upayanya untuk mengembangkan jenis hubungan antar negara yang baru. Pada tingkat yang lebih konkret, konsep BRI menawarkan manfaat khusus bagi Tiongkok di luar kontribusinya terhadap pengembangan visi Beijing yang lebih luas untuk Eurasia. Beberapa sumber Tiongkok yang otoritatif menekankan tujuan pembangunan domestik Tiongkok serta implikasi strategis eksternal dan tujuan dari konsep BRI (Jiang, 2018).

BRI adalah alat untuk mempromosikan pembangunan ekonomi nasional dengan meningkatkan ekspor, meningkatkan akses ke sumber daya alam, dan memberikan dukungan untuk kepentingan industri domestik. Dalam hal ini, ada sedikit keraguan bahwa Tiongkok melihat inisiatif BRI sebagai cara menghilangkan kelebihan kapasitas dalam modal barang dan konstruksi Tiongkok tertentu di sektor berorientasi industri. Hal ini dapat menjadi komponen yang semakin penting dari penyesuaian Tiongkok untuk menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (Rolland, 2015).

Selain itu juga tidak diragukan lagi untuk mengurangi ketegangan politik dan etnis. Ketegangan baik di dalam wilayah etnis Tiongkok dan di antara negara-negara Asia Tengah dan Timur Tengah. Selain itu, untuk memperkuat hubungan politik dengan autokrasi Asia Tengah yang kaya energi, serta tidak lain adalah untuk memberikan solusi damai atas ketegangan masalah Laut Tiongkok Selatan untuk negara Filipina dan untuk ASEAN sendiri (Rolland, 2015)

Tiongkok menduduki ekonomi terbesar kedua di dunia dengan *Produk Domestik Bruto* (PDB) nominal ($ 11,3 triliun pada tahun 2016, menurut *International Monetary Fund* (IMF) (IMF, 2018). Tiongkok merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat sejak awal abad ke-21, dengan pertumbuhan rata-rata 10%. Negara ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global, dan modelnya telah secara bertahap berubah dari model yang dipimpin ekspor ke model konsumen domestik. Fakta-fakta ini dapat menjelaskan mengapa pemerintah mau berinvestasi di luar negeri, terutama di bidang infrastruktur, dan telah menciptakan lembaga khusus untuk mengelolanya dalam beberapa tahun terakhir (Penelope & Shan, 2017, p. 2).

Filipina berencana untuk meminjam $ 3,4 miliar dari Tiongkok. Setidaknya tiga proyek infrastruktur telah disepakati antara Tiongkok dan Filipina, terutama untuk proyek irigasi, pasokan air dan kereta api. Negara ini memiliki infrastruktur yang menua dan bertujuan untuk mengembangkan ekonominya dengan tingkat pertumbuhan target 8% dan bersedia untuk membina hubungannya dengan Tiongkok. (Penelope & Shan, 2017, p. 3).

Mengingat masalah politik dan keamanannya, Filipina telah menghadapi kesulitan dalam hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Pada puncak sengketa teritorial, ia menghadapi penerapan aturan perdagangan dan peraturan komersial yang

lebih ketat oleh otoritas Tiongkok. Hal ini terbukti ketika Tiongkok memberlakukan standar dan persyaratan ketat makanan dan keamanan pada tahun 2012 yang menyebabkan larangan impor pisang dari Filipina. Larangan itu diberlakukan setelah petugas karantina Tiongkok menemukan kutu putih di beberapa wadah pisang yang dikirim ke Tiongkok. Keputusan itu secara luas dilihat sebagai pembalasan Tiongkok terhadap Filipina di puncak perselisihan di Beting Scarborough (Wong A. C., 2017, p. 1).

Namun, karena asumsi kepresidenan Duterte telah mengadopsi gaya keterlibatan yang lebih ramah dengan Tiongkok. Pendekatan akomodasinya telah ditukar ulang oleh berbagai ikrar pinjaman dan investasi yang akan mendanai proyek pembangunan infrastruktur di Filipina. Hal yang paling penting, nelayan Filipina telah kembali ke kegiatan normal mereka, meskipun masih diawasi oleh Penjaga Pantai Tiongkok (Ranada, 2017).

2.4 ASPEK KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PIHAK TIONGKOK

Haas menjelaskan mengenai para *stakeholder* yang menggunakan mode tawar-menawar strategis harus mampu memanfaatkan potensi yang tersedia yang mana dilakukan secara efisien dalam mencapai sebuah keuntungan atau akan menghasilkan sebaliknya (Haas, 2011, p. 376). Keuntungan tersebut didapatkan dengan adanya *Linker* memberikan tawaran yang merujuk kepada keuntungan untuk *Linker*. Pembahasan aspek keuntungan dan kerugian ini menunjukkan persentase seberapa besar Tiongkok dalam meredakan ketegangan beberapa hal dari tujuan Tiongkok.

Subbab ini akan menjabarkan dua aspek keuntungan dan kerugian dari pihak Tiongkok.

Satu hal yang sangat jelas untuk bisa didefinisikan sebagai aspek keuntungan dari Tiongkok ialah berhasilnya Tiongkok mempertahankan pembangunan pulau Shasa di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu Tiongkok juga berhasil dalam meredakan ketegangan klaim dari pihak Filipina yang beberapa tahun lalu sangat semangat menaruh protes terhadap tindakan dari Tiongkok. Keberhasilan Tiongkok ini bisa diterima oleh Filipina dengan menyodorkan bantuan investasi infrastruktur yang besar dari Tiongkok. Selain dengan membuat Filipina datang ke Tiongkok untuk menerima pembangunan perekonomian, Tiongkok juga mampu lebih meyakinkan Filipina memberikan pencerahan bahwa Tiongkok sebagai partner kerja sama dan saling menguntungkan.

Menurut Haas bahwa *Tactical Linkage* adalah cara mudah untuk meningkatkan keuntungan karena memperluas agenda dan manfaat yang akan diperoleh. Karena negosiasi dari penawaran tidak secara inheren, tentu saja adanya pengorbanan dari salah satu pihak yang mana tidak menimbulkan permasalahan dari negosiasi tersebut sehingga hal ini meningkatkan keuntungan pihak *Linker*. Pihak yang kuat *(Linker)* akan mendapatkan respon yang baik dari pihak yang lemah *(Linkee).* Kalaupun ada kerugian pada *Linkee* akan tetap mau karena *Linkee* juga merasa membutuhkan kemanfaatan dari tawaran yang tersedia. Terlebih lagi, kemanfaatan tersebut lebih diperlukan sehingga kerugian menjadi tidak begitu dipermasalahkan (Haas, 2011, p. 373).

Hal ini sesuai dengan pernyataan Haas di atas dengan adanya kerja sama saling ketergantungan ini dibuktikan dengan menjalankan Proyek BRI yang tentu saja dinilai

Filipina sebagai potensi pembangunan perekonomian yang besar dan sangat menguntungkan bagi Filipina. Terlebih lagi, aspek keuntungan yang didapat oleh Tiongkok adalah bergesernya arah kerja sama dan kedekatan Filipina dari Amerika Serikat menuju ke arah Tiongkok yang penuh dengan harapan pembangunan (Michael, 2016).

Tiongkok merasakan keuntungan dengan respon yang baik dari Filipina. Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah menghidupkan kembali hubungan yang sempat renggang dengan Tiongkok sejak mengambil alih kekuasaan pada tahun 2016 dan sering mengkritik kebijakan keamanan Amerika Serikat. Dia telah menolak patroli gabungan yang direncanakan oleh Amerika Serikat dan angkatan laut Filipina di perairan Laut Tiongkok Selatan yang diperselisihkan bersama dengan latihan tempur bersama yang dapat menyinggung Tiongkok (Michael, 2016).

Pada akhir 2016, administrasi Duterte mengambil langkah untuk mengakomodasi kepentingan keamanan Beijing dengan mengorbankan kerja sama keamanan Manila dengan Washington. Pada bulan Desember 2016, Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengumumkan bahwa tidak mungkin Manila akan mengizinkan militer Amerika Serikat untuk terus menggunakan Filipina sebagai basis untuk kebebasannya melakukan patroli navigasi di Laut Tiongkok Selatan. Duterte juga mengumumkan dia tidak akan protes ketika dilaporkan bahwa Tiongkok sedang memasang senjata di pulau-pulau yang disengketakan jauh di dalam zona ekonomi eksklusif Filipina (Renato Cruz De Castro, 2018).

Pada pertengahan Juli 2016 lalu, Duterte mengatakan bahwa dia ingin mengubah pendekatan konfrontatif Manila ke arah Tiongkok. Dia menyatakan keraguannya tentang kesediaan Amerika Serikat untuk datang ke dukungan Filipina dalam hal

konfrontasi militer dengan Tiongkok atas klaim teritorial mereka yang bersaing. Pada arah kebijakan Filipina ini menjadi bagian dari *keuntungan* Tiongkok dalam mengambil kepercayaan kepala negara atau rezim Filipina (Kipgen, 2017).

Tiongkok berhasil dalam menjalankan tawaran BRI dengan mendapatkan beberapa keuntungan. Kerja sama ini dilakukan Tiongkok karena keuntungan maksimal, dan tidak ada kerugian yang besar atau signifikan bagi keberlangsungan Tiongkok dalam menjalankan tawaran tersebut. Hal ini dibuktikan dengan adanya kepercayaan dari Filipina untuk menjalankan BRI dengan Tiongkok. Tiongkok mampu mengarahkan Filipina untuk melepas ketegangan dari klaim Laut Tiongkok Selatan. Maka hal ini sesuai dengan yang dipaparkan oleh Haas terkait *Tactical Linkage* sebagai cara sederhana untuk memaksimalkan keuntungan yang terpisah dari para pihak, meskipun hasil dari perundingan mungkin merupakan kesepakatan dari pemerintah yang baru (Haas, 2011, p. 373).